



PERANAN PROGRAM SERTIFIKASI DAI MUI DALAM UPAYA PENGUATAN PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA

Muhamad Alfah Ahwani^{1*}, Hasiolan²

^{1,2} Institut Nida El Adabi, Bogor, Indonesia

*Correspondence: alfanahwani@gmail.com

Abstract

The Dai Certification Program, organized by the Indonesian Ulama Council (MUI), aims to enhance the competence of preachers in delivering moderate and inclusive sermons. This research uses a descriptive qualitative literature study approach aimed at analyzing the role of the program in strengthening religious moderation in Indonesia, particularly amidst the challenges of globalization, societal pluralism, the rise of radicalism, and the increasing potential for religion-based conflicts. The findings of this research indicate that this program provides a better understanding of the principles of religious moderation and teaches preachers adaptive preaching methods to the local context. This certification also increases public trust in certified preachers. However, it was found that expectations did not match reality, namely, the minimal participation of preachers in this certification program, due to disagreements with the concept of moderation and group fanaticism. Similarly, there are challenges in the implementation of religious moderation, such as radicalization and extremism, which are threats to religious moderation, conflicts, and the role of moderation in balancing interfaith perspectives. Overall, this program plays a crucial role in building an inclusive and harmonious framework for preaching. To enhance the national impact of the program, these findings recommend the development of a broader program and collaboration with various stakeholders.

Keywords: dai certification; indonesian ulama council; religious moderation

Abstrak

Program Sertifikasi Dai yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk meningkatkan kompetensi para pendakwah dalam menyampaikan dakwah yang moderat dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis peranan program tersebut dalam upaya penguatan moderasi beragama di Indonesia, khususnya di tengah tantangan globalisasi, pluralitas masyarakat, maraknya radikalisme, dan meningkatnya potensi konflik berbasis agama. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip moderasi beragama dan mengajarkan para dai tentang metode dakwah yang adaptif terhadap konteks lokal. Sertifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendakwah yang telah bersertifikasi. Namun demikian, ditemukan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu minimnya keikutsertaan para pendakwah dalam program sertifikasi ini, dikarenakan adanya

ketidaksetujuan akan konsep moderasi dan fanatisme kelompok. Begitu juga adanya tantangan dalam penerapan moderasi beragama, seperti radikalisasi dan ekstremisme sebagai ancaman terhadap moderasi beragama, dan konflik dan peran moderasi dalam menyeimbangkan perspektif antar agama. Secara keseluruhan, program ini berperan penting dalam membangun kerangka dakwah yang inklusif dan harmonis. Untuk meningkatkan dampak program secara nasional, temuan ini merekomendasikan pengembangan program yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Sertifikasi dai; majelis ulama indonesia; moderasi beragama*

PENDAHULUAN

Keberagaman sosial di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang hidup berdampingan dengan berbagai agama, suku, dan budaya, bergantung pada moderasi beragama (Hasiolan Nasution, 2022). Di tengah arus globalisasi yang seringkali meningkatkan polarisasi sosial, semakin sulit untuk mempertahankan moderasi ini. Dakwah, sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai agama, seringkali menjadi alat yang jika tidak dilakukan secara moderat, dapat mempererat dan bahkan memecah belah masyarakat. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan terkait peran pendakwah yang sebagian mereka masih menyampaikan pesan-pesan yang eksklusif, intoleran, dan bahkan ekstrem, yang bertentangan dengan moderasi agama. Dalam situasi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan Program Sertifikasi Dai sebagai langkah strategis untuk mendukung moderasi beragama melalui legitimasi dan peningkatan kompetensi pendakwah (Akhmadi, 2019).

Program Sertifikasi Dai MUI bertujuan untuk memastikan bahwa para pendakwah memiliki kompetensi teologis dan mampu menerapkan prinsip moderasi dalam dakwah mereka. Toleransi, keadilan, dan keseimbangan adalah karakteristik moderasi beragama itu sendiri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pihak menentang program ini. Kemungkinan karena mereka tidak banyak tahu tentang konsep moderasi atau karena pengaruh ideologi tertentu. Dalam beberapa situasi, kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan konsep moderasi seringkali menggunakan platform dakwah untuk memperkuat

identitas eksklusif mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan memperlebar perpecahan sosial (Tawakkal & Lutfia, 2024).

Istilah “moderasi beragama” mengacu pada tujuan bersama untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup umat beragama. Oleh karena itu, untuk mencapai kedamaian, diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai. Ini jelas membutuhkan peran para tokoh agama dan pemerintah dalam membimbing dan mengarahkan komunitas atau jamaah mereka agar toleran dalam melakukan praktik agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing (Hasiolan & Munawar Ridho, 2025).

Untuk menjaga keseimbangan sosial dan keberagaman di Indonesia, moderasi beragama sangat penting, terutama di tengah tantangan globalisasi dan polarisasi agama yang semakin meningkat. Dalam peran mereka sebagai pendakwah agama, dai memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan yang tidak hanya bernuansa religius tetapi juga ramah dan sesuai dengan berbagai budaya. Program Sertifikasi Dai, yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), berfungsi untuk menjamin bahwa para dai memiliki kemampuan teologis dan sosial yang memadai untuk menyebarkan dakwah moderat. Program ini tidak hanya mengajarkan materi keagamaan, tetapi juga mengajarkan pendakwah bagaimana berkomunikasi dalam konteks pluralisme masyarakat. Ini memiliki potensi untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem atau eksklusif yang bertentangan dengan moderasi beragama (Akhmadi, 2019). Sertifikasi ini memberikan dai pengakuan resmi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dakwah mereka.

Dihubungkan dengan masalah sosial yang kompleks seperti radikalisme dan intoleransi, pentingnya moderasi beragama dalam dakwah semakin jelas. Peningkatan sebelumnya menunjukkan bahwa program sertifikasi ini meningkatkan pemahaman dai tentang pentingnya toleransi dan harmoni dalam keberagaman; namun, partisipasi dai yang rendah dan resistensi terhadap konsep moderasi adalah beberapa kendala yang menghalangi keberhasilan program.

Karena perbedaan ideologis atau kurangnya pemahaman tentang manfaat program ini, beberapa pendakwah terus menolak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi MUI untuk terus memperluas cakupan program dan membuat pendekatan yang lebih inklusif untuk menarik lebih banyak pendakwah. Untuk meningkatkan pengaruhnya secara nasional, program ini memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Sertifikasi Dai MUI dapat menjadi alat yang berguna untuk membangun narasi dakwah yang inklusif, damai, dan relevan dengan tantangan sosial saat ini dengan menggunakan pendekatan yang holistik (Tawakkal & Lutfia, 2024). Program ini juga menjadi sarana pendidikan penguatan pemahaman moderasi beragama di kalangan para Dai, terkhusus dalam wilayah cakupan MUI.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas Program Sertifikasi Dai telah menjadi topik yang menarik perhatian berbagai peneliti. Salah satu penelitian oleh (Kamaludin, 2024) dalam artikel yang berjudul “Polemik Program Sertifikasi Dai: Studi Wacana Kritis di Media Massa” mengupas isu hegemoni dalam diskursus sertifikasi dai, termasuk kekhawatiran bahwa program tersebut dapat dianggap sebagai intervensi atau pembatasan kebebasan dakwah. Dengan menggunakan pendekatan intertekstualitas dan praktik sosiokultural, penelitian ini memperlihatkan bagaimana teks media mencerminkan praktik sosial yang lebih luas, seperti dinamika politik dan keberagaman ideologi keagamaan di Indonesia.

Penelitian lain oleh Munib (2021) yang berjudul “Membongkar Wacana Sertifikasi Dai Menangkal Radikalisme dalam Program Televisi” mengungkap wacana sertifikasi dai yang telah berlangsung sejak 2017. Banyak media cetak dan siar menyoroti wacana tersebut, dan siaran televisi juga membahasnya. Karena banyak penceramah yang naik mimbar dengan pengetahuan keagamaan yang diragukan, mereka mungkin menyampaikan pesan keagamaan dengan intoleran, memicu radikalisme.

Penelitian lain oleh Abdilah & Zen (2024) yang berjudul “Strategi Marketing Sertifikasi DAI MUI dan PP Addai dalam Meningkatkan Kompetensi DAI di Era Digital” menguraikan cara-cara bagaimana program sertifikasi dai MUI Pusat dan

ADDAI dipromosikan melalui strategi pemasaran yang tidak terfokus pada keuntungan. Strategi ini juga digunakan untuk mempromosikan program sertifikasi dai oleh MUI dan ADDAI, yang merupakan organisasi atau wadah sosial keagamaan yang tidak mengejar keuntungan. MUI dan ADDAI berharap dapat menghasilkan pendakwah yang kompeten, berkualitas, berpengetahuan luas, dan berpendidikan tinggi.

Sertifikasi ini memiliki peran strategis dalam menghadapi narasi radikal yang berkembang di berbagai platform dalam konteks tantangan global. Pendakwah yang bersertifikasi diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan menyampaikan pesan agama yang santun, sesuai, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kehadiran dai yang berpengalaman akan membantu mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan kedamaian sekaligus mencegah penyebaran ideologi ekstremis.

Penelitian ini menyarankan peningkatan program sertifikasi dari segi kualitas kurikulum dan cakupan geografis. Dengan memberikan pelatihan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, program harus dapat memenuhi kebutuhan unik masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih masif untuk memberi tahu para dai tentang pentingnya sertifikasi ini. Ini akan mencakup melibatkan tokoh agama dan komunitas keagamaan selama proses pengembangan program.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam konteks ini karena fokusnya secara khusus pada Peranan Program Sertifikasi Dai MUI dalam Upaya Penguatan Moderasi Beragama. Penelitian ini meneliti bagaimana sertifikasi dai bukan hanya meningkatkan legitimasi dan kompetensi dakwah, tetapi juga menjawab perbedaan antara kenyataan dan harapan moderasi beragama. Diharapkan temuan ini akan memberikan wawasan baru yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, terutama tentang seberapa efektif sertifikasi dalam mengatasi tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi berbasis agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi literatur untuk memahami peran strategis program sertifikasi MUI dalam memperkuat moderasi beragama. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur dari jurnal ilmiah dan media masa yang kredibel. Data dianalisis dengan metode analisis isi atau *content analysis*. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber. Dampak program terhadap kemampuan pendakwah untuk menyampaikan pesan yang moderat dan toleran di tengah masyarakat yang plural adalah tujuan dari pendekatan ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dai

Dai secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang merupakan *isim fa'il* (pelaku) berasal dari kata kerja (دَعَا - يَدْعُو) bermakna menyeru. Secara umum Dai adalah sebutan Mubaligh berarti orang yang menyampaikan ajaran Islam, tetapi arti ini sangat sempit karena masyarakat biasanya mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan sebagai penceramah, Khatib (orang yang berkhotbah), atau dengan kata lain Dai adalah orang yang melakukan dakwah. Dengan kata lain, Dai harus mengikuti metode sesuai sunnah agar hasilnya dapat sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, menurut M. Natsir, kepribadian dan akhlak Dai menentukan keberhasilan mereka (Syarifuddin et al., 2022).

Sebagai pelaku dakwah, dai memainkan peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama di masyarakat yang terdiri dari berbagai agama. Pemahaman bahwa seorang dai harus mengikuti metode Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya pendekatan dakwah yang berbasis hikmah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam Islam, moderasi beragama, yang merupakan inti dari agama, tercermin dalam keseimbangan antara mempertahankan prinsip dan menerima keberagaman. Oleh karena itu, dai tidak hanya menyampaikan pesan,

tetapi juga membantu menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan dakwah yang inklusif dan tidak ekstrem.

Kepribadian dan akhlak seorang dai sangat penting dalam konteks moderasi beragama untuk membangun kredibilitasnya di mata masyarakat. Akhlak yang baik tidak hanya memperkuat pesan dakwah, tetapi juga menjadi contoh nyata dari moderasi dalam kehidupan sehari-hari, menurut M. Natsir (Chaerunnisa et al., 2024). Hal ini penting karena narasi ekstremisme atau eksklusivitas agama yang dapat mengancam harmoni sosial sering kali memengaruhi tantangan dakwah saat ini. Oleh karena itu, tugas dai moderat adalah untuk mendorong pemahaman lintas agama dan budaya serta menciptakan ruang diskusi yang inklusif (Hasiolan Nasution, 2022).

Metode ini juga sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, yang hanya dapat dicapai melalui dakwah yang menghormati pluralitas. Dalam hal ini, program sertifikasi dai yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tujuan strategis untuk membekali pendakwah dengan prinsip moderasi dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai konteks sosial. Seorang dai dapat menjadi motor penggerak moderasi beragama di era modern dengan menggabungkan kepribadian yang mulia dan metode dakwah yang relevan.

Program Sertifikasi Dai MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang membimbing, mendakwahkan, dan melindungi umat Islam dari perkara kesesatan. MUI adalah organisasi musyawarah ulama, aktivis dakwah, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Presiden Suharto mendirikan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada 26 Juli 1975 (Kurniawan & Fachran Haikal, 2024).

MUI didirikan dengan tujuan untuk membentuk wadah ukhuwah dan komunikasi yang baik antara umat Islam dan pemerintah. MUI juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kegiatan dakwah Islam, termasuk memberikan fatwa

halal haram, dan membantu organisasi agama Islam yang sudah ada bekerja sama untuk menciptakan persatuan dan kedamaian (Kurniawan & Fachran Haikal, 2024).

Sertifikasi Dai yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah program penilaian kompetensi bagi para pendakwah yang bertujuan untuk memastikan bahwa dakwah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa seorang dai memiliki pemahaman agama yang mendalam, kemampuan komunikasi yang baik, dan komitmen pada nilai moderasi agama. Selain itu, program ini bertujuan untuk menangani masalah dakwah yang sering disalahgunakan untuk mendukung sektarianisme atau radikalisme. Diharapkan dai yang disertifikasi dapat menyampaikan dakwah secara inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan konteks harmoni sosial masyarakat (Syarifuddin et al., 2022).

Menurut Dr. KH. Ahmad Zubaidi, MA, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, sertifikasi ini diberikan dengan tujuan untuk melaksanakan standarisasi dai, termasuk meningkatkan kemampuan dan kualitas para pendakwah. Tantangan dakwah semakin meningkat, terutama karena konten dakwah yang tidak jelas rujukannya. MUI berharap para dai memiliki kapasitas yang luas, menguasai materi keagamaan dan kebangsaan, dan mengutamakan dakwah yang santun (Abdilah & Zen, 2024).

Sangat penting bagi Indonesia untuk menerapkan program sertifikasi ini sebagai cara untuk meningkatkan moderasi beragama. Dalam konteks dakwah, standarisasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kemampuan dai untuk berkomunikasi dan memahami materi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pesan dakwah yang disampaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil'alamin. Dengan sertifikasi ini, dai diharapkan dapat menyampaikan pesan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, harmoni, dan penghormatan terhadap keberagaman, sesuai dengan tujuan dakwah.

Urgensi program ini juga terkait dengan tantangan dakwah kontemporer, di mana konten keagamaan yang tidak sah sering beredar melalui media sosial atau ceramah publik yang tidak berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi

agama yang ekstrem yang dapat mengancam keharmonisan bangsa. Oleh karena itu, sertifikasi menjadi tindakan pencegahan yang bijaksana untuk mengurangi risiko tersebut. MUI bertanggung jawab untuk menyediakan kerangka acuan yang jelas bagi dai agar mereka dapat menyampaikan dakwah yang selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus menjaga integrasi bangsa.

Ketua MUI, KH. Cholil Nafis, menjelaskan beberapa tujuan pelaksanaan standarisasi dai sebagai payung dan tenda besar umat islam. Dia menjelaskan bahwa tujuan tersebut adalah (1) meningkatkan kompetensi dan kualitas dai, (2) legalisasi dai, (3) memberikan kesempatan untuk mengisi dakwah di televisi, (4) MUI akan merekomendasikan para dai yang telah bersertifikat untuk mengisi dakwah di lembaga atau lembaga pemerintah lainnya, dan (5) Legalitas dai ini, orang bisa berdakwah di negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura (Abdilah & Zen, 2024).

MUI memulai sertifikasi dai sebagai bukti komitmennya untuk mendukung moderasi beragama di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi dan legitimasi dai, tetapi juga merupakan alat penting untuk memilih pendakwah yang dapat menyampaikan ajaran Islam yang selaras dengan nilai-nilai moderasi. Hal ini penting karena Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan Islam yang damai dan toleran. Dengan standarisasi ini, MUI memastikan kualitas dakwah di dalam negeri dan menyiapkan dai yang dapat berkontribusi di tingkat internasional.

Di tengah ancaman polarisasi dan radikalisme, peran MUI sebagai "payung besar umat Islam" menjadi sangat strategis untuk mendorong moderasi beragama. Sertifikasi ini memastikan bahwa dakwah didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal selain teks agama. MUI juga berusaha membangun kepercayaan publik terhadap dai yang bersertifikat sebagai figur dakwah yang inklusif dan bertanggung jawab dengan menyarankan lembaga pemerintah dan

platform publik seperti televisi. Ini memiliki efek ganda: dakwah menjadi lebih baik dan hubungan antarumat beragama di Indonesia lebih baik.

Upaya MUI untuk menyesuaikan strategi dakwah dengan tuntutan zaman sekarang. Dakwah di era globalisasi membutuhkan dai yang paham agama dan dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai budaya. Legalitas dai yang diakui secara internasional merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki populasi muslim yang besar dan pendakwah yang berkualitas. Hal ini memainkan peran penting dalam menyuarakan Islam moderat di seluruh dunia, menguatkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang damai, toleran, dan dapat menyelesaikan masalah yang muncul di seluruh dunia.

Oleh karena itu, sertifikasi dai oleh MUI adalah bukti nyata dari dukungan MUI terhadap moderasi beragama. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dai individu, tetapi juga memperkuat legitimasi dakwah sebagai bagian dari menjaga keutuhan bangsa dan membangun citra Islam yang positif di dunia. Urgensi ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan dakwah yang mencerahkan secara spiritual dan menciptakan keharmonisan sosial.

Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa masalah penting yang terkait dengan pelaksanaan program. Salah satunya adalah partisipasi dai yang rendah dalam program sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah sebagian kaum muslimin tidak setuju dengan gagasan moderasi beragama yang diajukan, dan yang kedua adalah fanatisme kelompok yang menghambat proses penerapan prinsip moderasi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan tindakan strategis karena tantangan ini menunjukkan bahwa tujuan program masih jauh dari kenyataan di lapangan. Selain itu, ditemukan beberapa tantangan dalam penerapan moderasi beragama, seperti radikalisasi dan ekstremisme sebagai ancaman terhadap moderasi beragama, dan konflik dan peran moderasi dalam menyeimbangkan perspektif antar agama.

Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Sertifikat Dai MUI

Pada dasarnya, agama Islam memiliki prinsip-prinsip moderasi yang kuat, termasuk konsep keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi

(*tasamuh*). Konsep keadilan, keseimbangan, dan toleransi ini merupakan bagian dari paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, yang dapat dilihat sebagai ajaran yang fleksibel, moderat, dan kontekstual. Metode pengambilan hukum yang menggabungkan nash dan akal menunjukkan kemoderatan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Di sisi lain, cara berpikir secara umum mampu menggabungkan wahyu dan akal. Dua ekstrimisme, ekstrimisme tekstual dan ekstrimisme akal, dapat diredam oleh perspektif moderasi beragama.

Konsep moderasi beragama mengacu pada sikap tengah, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam praktik keagamaan dan keyakinan. Ini melibatkan sikap inklusif, diskusi antaragama, dan upaya untuk menciptakan harmoni antar umat beragama. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya mencegah ekstremisme, intoleransi, dan konflik berbasis agama (Wulansari et al., 2019). Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang selalu mengutamakan keadilan dan tidak ekstrem. Setelah melihat beberapa pendapat yang diberikan oleh organisasi masyarakat di Indonesia tentang moderasi beragama, mereka mencapai kesimpulan bahwa pemahaman tentang moderasi beragama yang sama dengan berbagai cara penyajian (Wardah et al., 2024).

Moderasi beragama mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada, yang dianggap sebagai *sunnatullah* dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercermin dalam sikap tidak mudah menyalahkan, bahkan sampai pengkafiran terhadap individu atau kelompok pandangan yang berbeda. Moderasi ini lebih menekankan persaudaraan yang didasarkan pada kemanusiaan daripada keyakinan atau kebangsaan. Hal ini terlihat dalam dunia Islam secara keseluruhan, yang sedang mengalami krisis kemanusiaan, dan terutama di Indonesia, yang masih menghadapi banyak masalah kemanusiaan karena sikap beragama yang kurang moderat (Akhmadi, 2019).

Piagam Madinah adalah bukti bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menghormati perbedaan agama, dan beberapa ulama menganggapnya batal karena

Yahudi berkhianat. Namun, lahirnya Piagam Madinah menunjukkan bahwa kemanusiaan lebih penting daripada kefanatikan berlebihan dalam agama (al-Mujtahid et al., 2022). Karena karakteristik Islam moderat dalam Alda Sirait et al. (2023) antara lain adalah pertengahan (*tawassuth*), adil (*i'tidal*), seimbang (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), kesetaraan (*musawah*), musyawarah (*syu'ara*), dinamis (*aulawiyah, tathawwur wa ibkar*), berkeadaban (*tanadhdhur*), dan reformasi (*islah*).

Menurut Asiva Noor Rachmayani (2015), praktik moderasi agama memiliki beberapa tujuan, yaitu (1) Mengurangi kemungkinan konflik agama yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan, (2) Mengajarkan orang untuk bertoleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan agama, (3) Mencegah penyebaran ideologi ekstremisme dan radikalisme yang dapat mengganggu keseimbangan sosial, (4) Mendorong diskusi konstruktif antara berbagai komunitas agama untuk mencapai pemahaman bersama dan kerja sama, (5) Memberikan standar etis dan moral yang membantu individu dan komunitas mencapai keadilan sosial dan menyelesaikan konflik, (6) Memastikan bahwa semua komunitas agama terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi, dan (7) Menciptakan tempat yang aman dan harmonis bagi semua warga negara, yang berkontribusi pada keamanan dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Problem dengan penerapan moderasi agama termasuk (1) Di berbagai belahan dunia, moderasi beragama menghadapi tantangan ekstrimisme dan radikalisasi agama. Seorang pakar radikalisasi, Olivier dalam Rachmayani (2015), mengatakan bahwa jenis kejadian ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial tetapi juga menghambat upaya untuk mendorong percakapan agama dan toleransi. Dia berpendapat bahwa ekstremisme agama kontemporer cenderung mengurangi fungsi para pemimpin agama moderat, yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komunitas agama dalam masyarakat, dan (2) Perbedaan agama sering menyebabkan konflik. Moderasi beragama sangat penting dalam situasi seperti ini untuk mendorong diskusi konstruktif dan pemahaman

saling menghormati. Moderasi beragama tidak hanya berusaha untuk menyeimbangkan pendapat yang ada, tetapi juga untuk mencegah konflik lebih lanjut dan membantu perdamaian. Dengan mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kerjasama antaragama, moderasi beragama berusaha mengurangi konflik yang muncul karena perbedaan agama. Dalam situasi seperti ini, peran pemimpin agama yang moderat sangat penting karena mereka seringkali dapat menyampaikan pendapat dan sikap mereka dengan cara yang moderat kepada umatnya, mengurangi ketegangan, dan membangun kepercayaan di antara berbagai komunitas agama (Wulansari et al., 2019).

Untuk mengatasi masalah dalam praktik moderasi beragama, terutama di tengah meningkatnya ekstremisme dan radikalisasi, sertifikasi Dai MUI adalah langkah strategis. Standarisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dai, tetapi juga untuk memastikan bahwa para dai menyampaikan nilai-nilai Islam yang mendukung toleransi, keberagaman, dan harmoni sosial. Hal ini penting karena, seperti yang dinyatakan Olivier dalam (Wulansari et al., 2019), radikalisasi agama dapat mengurangi fungsi pemimpin agama moderat yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung antar komunitas beragama. Dengan memperkuat kapasitas para dai melalui sertifikasi, MUI memberikan landasan kokoh untuk praktik moderasi beragama yang dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Moderasi beragama adalah sarana penting untuk mendidik para dai dalam menanggulangi konflik berbasis agama untuk mendorong pembicaraan konstruktif dan pemahaman lintas agama. Sertifikasi dai memastikan bahwa materi dakwah didasarkan pada pemahaman agama yang mendalam dan nilai-nilai universal seperti toleransi dan perdamaian. Untuk menghindari bias sektarian dalam dakwah, yang sering menyebabkan konflik horizontal, moderasi ini sangat penting. Program sertifikasi memastikan bahwa dai dapat berfungsi sebagai agen perdamaian yang

dapat meredakan konflik dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Selain itu, pemimpin agama yang diakui sangat penting dalam mengatasi masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia, seperti penyebaran ideologi ekstremisme melalui media sosial. Sertifikasi dai meningkatkan kepercayaan publik selain menunjukkan kemampuan individu. Dai yang diakui menjadi representasi Islam yang moderat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, standarisasi dai oleh MUI adalah langkah maju menuju pendekatan dakwah yang lebih sistematis, terarah, dan mengikuti semangat moderasi beragama yang menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan (Wulansari et al., 2019).

Dapat dipastikan bahwa pendidikan moderasi beragama yang dilakukan melalui Sertifikasi Dai MUI merupakan sebuah terobosan baru dan adaptif untuk memastikan para dai siap dengan kondisi masyarakat yang multikultural sehingga menciptakan kondisi sosial yang tenang demi terjalannya nilai-nilai Islam di atas bumi Indonesia. Melalui pendidikan tersebut juga memberikan kemudahan kepada masyarakat siapa-siapa saja dai kredibel yang dibuktikan sudah lulus sertifikasi dakwah MUI. Sesuai makna dai yang berarti pengampai atau penyeru bukan pembuat kacau atau kerusuhan di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sertifikasi Dai memberikan pendidikan moderasi beragama dan teknik dakwah yang disesuaikan dengan konteks lokal. Karena pendakwah bersertifikasi dianggap lebih mahir dan memiliki legitimasi yang jelas, program ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Selain itu, sertifikasi ini membantu membangun kerangka dakwah yang damai dan inklusif, yang membantu menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Selain itu, penelitian ini menyarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya

tercapai. Evaluasi ini harus mencakup elemen kualitas pelatihan, tingkat partisipasi dai, dan dampak program terhadap masyarakat. Oleh karena itu, MUI dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan rencana perbaikan yang lebih efisien. Program ini bergantung pada pelatihan yang baik dan dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu, MUI, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memasukkan nilai moderasi beragama ke dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dapat membantu membangun masyarakat yang damai dan toleran dengan menggunakan pendekatan yang inklusif. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan dampak program secara nasional. Program Sertifikasi Dai harus diperluas dengan melibatkan berbagai bagian masyarakat, seperti pemerintah, media massa, dan lembaga pendidikan. Kerja sama ini tidak hanya akan memperluas jangkauan program tetapi juga akan memperkuat legitimasi dan penerimaan konsep moderasi beragama melalui Sertifikasi Dai MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A., & Zen, M. (2024). Strategi Marketing Sertifikasi DAI MUI dan PP Addai dalam Meningkatkan Kompetensi DAI di Era Digital. *ULILALBAB:JurnalIlmiahMultidisiplin*, 3(8), 363–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i8.4326>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- al-Mujtahid, N. M., Alfikri, M., & Sumanti, S. T. (2022). Penguatan Harmoni Sosial Melalui Moderasi Beragama dalam Surah Al-Kafirun Perspektif Komunikasi Pembangunan (Analisis UINSU “Kampus Moderasi Beragama.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 531–544. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2042>
- Alda Sirait, A., Pramita, S., Al Farabi, M., & Aidah Ritonga, A. (2023). Rumah Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Islam Washatiah Di Era Society 5.0 (Analisis Q.S.Al Baqarah/2. *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 7(2), 2580–4022. <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/el-warqoh>
- Chaerunnisa, I., Hasiolan, & Lutfi. (2024). The Leadership Values of Umar bin Khattab in Islamic Education in The Era Of Generation Alpha. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 09(67), 413–418. <https://doi.org/10.55573/JISED.096739>
- Hasiolan, & Munawar Ridho. (2025). Kurikulum Berbasis Moderasi pada Program

- Studi Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Swasta Aceh. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 26–44.
<https://doi.org/10.58353/jak.v4i1.244>
- Hasiolan Nasution. (2022). Al-Qur'an dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia. *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis*, 2(1), 19–38.
<https://doi.org/10.57217/al dhikra.v2i1.770>
- Kamaludin, M. (2024). Polemik Program Sertifikasi Dai: Studi Wacana Kritis di Media Massa. *Lenvari: Journal of Social Science*, 2(1), 25–41.
<https://doi.org/10.61105/jss.v2i1.100>
- Kurniawan, R., & Fachran Haikal, M. (2024). Manajemen Dakwah MUI dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Kabupaten Deli Serdang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 1–14.
<https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.1-14>
- Munib, A. (2021). Membongkar Wacana Sertifikasi Dai Menangkal Radikalisme dalam Program Televisi. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 53.
<https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2957>
- Syarifuddin, M., Magister, P., Dan, K., Islam, P., & Semarang, U. I. N. W. (2022). *STRATEGI DAKWAH MAJELIS ULAMA INDONESIA*. UIN Walisongo Semarang.
- Tawakkal, A. T., & Lutfia, A. (2024). Peran Moderasi Beragama dalam Meredam Potensi Konflik di Era Digital. *Jurnal Ushuluddin*, 26, 323–337.
- Wardah, S. N., Hawa, R. N., Zahra, S. A., Nabilah, S., & Anwar, S. (2024). Dakwah Inklusif sebagai Sarana Generasi Z untuk Mewujudkan Moderasi Beragama. *Idarotuna*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v6i1.27072>
- Wulansari, A., Azizah, & Zidan, M. (2019). Tantangan Dan Dinamika Dalam Moderasi Beragama Menuju Harmoni Sosial. *Al-IKTIAR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 157–164.